

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil informasi yang diperoleh, peneliti memiliki kesimpulan bahwa terdapat penguatan intervensi pusat sebagai akibat dari adanya penangguhan pilkada. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan kepemimpinan, dan pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan di daerah yang pemilihannya ditunda. Pemerintah pusat menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas untuk menggantikan kepala daerah yang sudah menyelesaikan masa jabatannya. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan stabilitas dan keamanan dalam menjalankan pemerintahan di daerah yang mengalami penangguhan. Namun di sisi lain, ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait demokrasi lokal dan otonomi daerah, karena keputusan yang seharusnya diambil oleh pemimpin terpilih akhirnya diambil oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat peningkatan pada indeks demokrasi di DKI Jakarta, yaitu dari 76,24 menjadi 80,21. Peningkatan terjadi di dimensi akuntabilitas horizontal sebesar 70,69 menjadi 73,12 (naik 2,43 poin), dimensi partisipasi sebesar 70,23 menjadi 77,14 (naik 6,91 poin), dimensi akuntabilitas vertikal dan daya tanggap 67,90 menjadi 79,57 (naik 11,67 poin), dan dimensi supremasi hukum 73,69 menjadi 78,71 (naik 5,02 poin). Sedangkan penurunan hanya terjadi pada dua dimensi saja, yaitu di dimensi kebebasan dan kompetisi sebesar 89,27 menjadi 87,39 (turun 1,88 poin), dan dimensi kesetaraan sebesar 85,67 menjadi 85,34 (turun 0,33). Namun indeks-indeks ini belum sepenuhnya menentukan demokrasi berkualitas tinggi atau tidak. Demokrasi adalah proses *'becoming'* yang terus-menerus. Proses *becoming* perlu dilakukan baik dalam penyempurnaan indeks-indeks yang ada (dalam hal ini adalah IKIP dan IDI) ataupun penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Kelemahan penelitian ini adalah periode penelitian hanya berada pada tahun 2021 dan 2022, dan hanya berfokus pada penangguhan pilkada tahun 2022. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melanjutkan penelitian ini lebih lanjut.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan temuan penelitian serta pembahasan yang peneliti bahas, peneliti menyarankan untuk pemerintah DKI Jakarta dapat mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah dengan lebih lekat. Pemerintah DKI Jakarta sudah sepantasnya bisa memberantas politik identitas, serta membangun budaya demokrasi yang inklusif, toleran, dan pluralis. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi penyelenggara pemilihan melalui seleksi yang ketat, memberikan pelatihan yang memadai, memberikan kewenangan yang cukup, mekanisme koordinasi yang efektif dalam pengawasan ataupun pencegahan, dan memberlakukan kode etik dengan jelas. Dengan begitu para penyelenggara pemilihan dapat dengan tegas menindak pelanggaran ataupun penyimpangan pada pemilihan.